

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi MCP oleh Inspektorat Daerah Kota Depok, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan MCP telah berjalan, namun belum sepenuhnya terimplementasikan secara optimal. MCP telah berfungsi sebagai instrumen pencegahan korupsi yang mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan penguatan sistem pengawasan internal. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa terdapat kesenjangan antara tujuan kebijakan dan praktik pelaksanaannya di lapangan, terutama pada aspek pemenuhan indikator, konsistensi pelaporan, serta internalisasi MCP sebagai bagian dari budaya kerja birokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa MCP di Kota Depok masih cenderung dipahami sebagai kewajiban administratif, belum sepenuhnya sebagai instrumen pencegahan korupsi yang bersifat substantif.

Berdasarkan hasil penelitian, standar dan tujuan kebijakan MCP telah dirumuskan secara jelas dan terstruktur, serta dipahami oleh Inspektorat Daerah Kota Depok sebagai aktor implementasi utama. Kejelasan indikator dan pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh KPK memberikan arah yang relatif tegas bagi Inspektorat dalam menjalankan fungsi pengawasan dan koordinasi pemenuhan MCP. Dengan demikian, variabel standar dan tujuan kebijakan telah terimplementasikan dengan baik, meskipun pada tataran praktik masih

diperlukan penguatan dalam memastikan bahwa pemenuhan indikator tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga substantif sesuai tujuan pencegahan korupsi. Variabel sumber daya dalam implementasi MCP di Kota Depok telah terpenuhi secara memadai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Inspektorat, Sekretariat Daerah, serta DPRD, kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki Inspektorat dinilai cukup dan mumpuni dalam mendukung pelaksanaan MCP. Dukungan sumber daya ini memungkinkan Inspektorat menjalankan fungsi koordinasi, pengawasan, dan pelaporan MCP secara berkelanjutan. Namun demikian, penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkala melalui kegiatan bimbingan teknis, penguatan kompetensi, dan pembaruan pemahaman kebijakan tetap diperlukan guna menjaga konsistensi dan kualitas implementasi MCP dalam jangka panjang.

Komunikasi dan koordinasi antarorganisasi dalam implementasi MCP telah berlangsung secara fungsional, dengan Inspektorat Daerah berperan sebagai simpul koordinasi utama antara perangkat daerah terkait. Mekanisme komunikasi dilakukan melalui penyampaian informasi kebijakan, koordinasi pelaporan, serta klarifikasi atas pemenuhan indikator MCP. Meskipun komunikasi antarorganisasi telah berjalan, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi masih perlu diperkuat agar tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi, tetapi juga mampu mendorong kesamaan pemahaman terhadap substansi MCP sebagai instrumen pencegahan korupsi. Dari sisi karakteristik lembaga pelaksana, Inspektorat Daerah Kota Depok

memiliki kesesuaian yang kuat dengan tujuan kebijakan MCP. Secara struktural dan fungsional, Inspektorat memiliki kewenangan, legitimasi, serta pengalaman dalam menjalankan pengawasan internal pemerintahan daerah. Karakteristik kelembagaan ini mendukung peran Inspektorat sebagai aktor utama dalam memastikan keterpenuhan indikator MCP sekaligus menjaga integritas proses implementasinya. Oleh karena itu, variabel ini dapat dinyatakan telah terimplementasikan dengan baik.

Kondisi ekonomi, sosial, dan politik dalam implementasi MCP di Kota Depok berada dalam lingkungan yang relatif kondusif. Dukungan struktural dari pimpinan daerah serta tidak ditemukannya hambatan politik yang signifikan memperkuat posisi Inspektorat dalam menjalankan peran implementasinya. Relasi kelembagaan antara Inspektorat dengan perangkat daerah lain, Sekretariat Daerah, dan DPRD berlangsung dalam kerangka profesional dan administratif, sehingga faktor eksternal berfungsi sebagai faktor pendukung dan tidak menjadi penghambat pelaksanaan MCP. Sikap dan disposisi pelaksana kebijakan, khususnya Inspektorat Daerah Kota Depok, menunjukkan adanya komitmen institusional yang kuat terhadap pelaksanaan MCP sebagai instrumen pencegahan korupsi. Inspektorat tidak hanya menjalankan MCP sebagai kewajiban formal, tetapi juga memandangnya sebagai bagian dari upaya penguatan sistem pengawasan internal pemerintah daerah. Dukungan dari Sekretariat Daerah, DPRD, serta perangkat daerah lainnya berperan sebagai bentuk legitimasi dan penguat atas disposisi Inspektorat, tanpa menggeser perannya sebagai aktor utama implementasi

kebijakan. Dengan demikian, variabel disposisi pelaksana telah terimplementasikan secara positif.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa implementasi Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh Inspektorat Daerah Kota Depok telah berjalan dalam kerangka kebijakan yang jelas dan didukung oleh kapasitas kelembagaan serta lingkungan eksternal yang relatif kondusif. Inspektorat Daerah berperan secara sentral sebagai aktor utama implementasi, baik dalam mengoordinasikan pemenuhan indikator maupun dalam memastikan proses pengawasan berjalan sesuai dengan tujuan pencegahan korupsi. Meskipun pelaksanaan MCP belum sepenuhnya terlepas dari kecenderungan administratif, temuan penelitian ini menunjukkan adanya komitmen institusional yang konsisten dari Inspektorat untuk menjadikan MCP sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan daerah. Oleh karena itu, keberlanjutan dan efektivitas MCP di Kota Depok ke depan sangat ditentukan oleh kemampuan Inspektorat dalam menjaga konsistensi implementasi, memperkuat kualitas pelaksanaan, serta mendorong internalisasi nilai pencegahan korupsi dalam sistem pengawasan internal pemerintah daerah.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian tersebut, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan MCP dan mendukung tujuan pencegahan korupsi secara lebih komprehensif, yaitu:

- a. Diperlukan penguatan koordinasi oleh Inspektorat Daerah Kota Depok dengan seluruh OPD agar ketepatan waktu dan kualitas dokumen pemenuhan indikator MCP dapat lebih terjaga. Komunikasi yang lebih terstruktur diharapkan dapat meminimalkan revisi berulang dan meningkatkan keseragaman pemahaman antar OPD.
- b. Diperlukan pendampingan teknis yang berkelanjutan perlu terus dilakukan, khususnya bagi pegawai yang baru terlibat dalam pelaksanaan MCP. Penyediaan panduan internal dan pelatihan singkat dapat membantu mempercepat proses adaptasi tanpa menghambat pelaksanaan MCP secara keseluruhan.
- c. Diperlukan upaya penguatan pencegahan korupsi secara lebih substantif agar tidak semata berfokus pada pemenuhan administratif. Optimalisasi *Whistleblowing System*, pembinaan etika aparatur, serta penguatan budaya integritas dapat menjadi langkah pelengkap dalam mendorong internalisasi nilai antikorupsi.
- d. Data dan informasi yang dihasilkan melalui MCP perlu dimanfaatkan secara lebih optimal sebagai dasar evaluasi kinerja dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Pemanfaatan data tersebut diharapkan dapat menjadikan MCP tidak hanya sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih tepat.